KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 7 3 4  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan						
A. IDENTIT	AS PENERIMA PENG	HASILAN	N YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 4 1 4 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK	:							
A.3 Nama : ALFIAN SALAM, AMD.KEP.								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)		PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5	21-402-01		7.855.000	7.855.000	0	5	392.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy							2 0 2 2 <i>уууу</i>	
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomo	Nomor : Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0						
	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :						_		
C.5		1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5 Nama Penandatangan :		RIANDY						
		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
[ 5 6 8 8			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	okumen ini tela	ah ditandatangani secara	

3W0BYVXT